

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu kegiatan usaha yang memiliki fungsi dan peranan penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta berperan dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang demokratis. Selain sebagai penyedia lapangan kerja, koperasi juga mempunyai ciri-ciri kebersamaan, keterbukaan serta kekeluargaan. sesuai dengan tujuan yang didirikan dari koperasi yaitu sebuah organisasi usaha yang membangun dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa khususnya bagi masyarakat pada umumnya. Badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai gerakan rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pasal 35 menyebutkan bahwa koperasi diwajibkan menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya : Neraca, Perhitungan Hasil Usaha, Catatan Atas Laporan Keuangan (Penjelasan). Kemudian laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan koperasi yang dijelaskan di dalam Peraturan Menteri KUKM No. 12 Tahun 2015, yaitu laporan perubahan ekuitas (modal), laporan arus kas. Lalu untuk koperasi yang bergerak di kegiatan simpan pinjam berdasarkan Peraturan Menteri KUKM No. 13 Tahun 2015, laporan keuangan koperasi meliputi : neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan.

Pertumbuhan jumlah koperasi di Indonesia yang semakin meningkat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang produktif. Meningkatnya jumlah koperasi yang meningkat dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan bisa memberikan pekerjaan bagi para masyarakat. koperasi juga merupakan salah satu entitas yang menghadapi kendala mengenai penyusunan laporan keuangan terkait dengan akuntabilitas publik suatu entitas bisnis. Dan untuk memperjelas menurut Sariningtyas dan Diah, (2011) menyatakan bahwa SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) pada tanggal 17 Juli 2009 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) membentuk SAK ETAP untuk membantu proses penyelenggaraan akuntansi secara lebih sederhana dan SAK ETAP tersebut berlaku pada 1 Januari 2011. Laporan keuangan koperasi yang baik itu seharusnya mampu menyajikan informasi mengenai kondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan koperasi yang berguna untuk pengambilan keputusan. Maka dari itu penyajian laporan keuangan harus memahami karakteristik kualitatif informasi laporan keuangan yaitu : dapat dipahami, relevan, materialistis, keandalan, pertimbangan sehat, dapat dibandingkan, substansi

mengungguli bentuk, kelengkapan, tepat waktu, dan keseimbangan antara biaya dan manfaat (SAK ETAP, 2009:6-9). Penelitian ini mengacu pada variabel-variabel dalam penelitian Rudiantoro dan Siregar (2012) yang di duga dapat mempengaruhi pemahaman bagian akuntansi koperasi atas isi aturan SAK ETAP, seperti latar belakang pendidikan , jenjang pendidikan, masa tugas pekerjaan, pemberian informasi dan sosialisasi. Isi aturan yang ada pada SAK ETAP bertujuan untuk menganalisis dan memberikan bukti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman SAK ETAP diantaranya yaitu pemberian informasi dan sosialisasi, jenjang pendidikan, dan latar belakang pendidikan. Penggunaan variabel tersebut antara lain,tingkat pendidikan pada bagian akuntansi berpengaruh pada penyusunan dan pelaporan keuangan suatu entitas termasuk dalam penyediaan informasi akuntansi sesuai standar yang berlaku.

Gray (2006) dan Hermert et al (2011) menyatakan seseorang dengan jenjang pendidikan yang tinggi akan mudah dalam menyerap pengetahuan baru. Murniati (2002) juga menemukan pengusaha dengan jenjang pendidikan yang tinggi akan lebih siap dalam penggunaan informasi yang memadai dikarenakan materi akuntansi yang di dapat lebih banyak dibandingkan pengusaha dengan jenjang pendidikan yang rendah. Tingginya pendidikan yang ditempuh dapat juga mempermudah menyerap ilmu tentang SAK ETAP, karena hal tersebut dapat memberikan persepsi yang baik terhadap SAK ETAP karena kemudahannya dalam menyusun laporan keuangan. *Theory Planned Of Behavior* mengasumsikan bahwa manusia sebagai makhluk yang mampu berfikir rasional menggunakan informasi yang diperolehnya untuk memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mengambil keputusan (Azjen 1991: 2006) .

Latar belakang pendidikan jurusan akuntansi akan mempunyai persepsi yang baik mengenai SAK ETAP dibandingkan dengan yang berlatar belakang non akuntansi pada pegawai yang bekerja pada bagian akuntansi koperasi. Penelitian Aufar (2014) membuktikan latar belakang pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Mereka akan lebih mudah menerima informasi maupun sosialisasi mengenai aturan tersebut karena telah memiliki pengetahuan tentang pelaporan keuangan sebelumnya. Andriani,(2014) juga menyatakan bahwa latar belakang pendidikan merupakan faktor internal yang memiliki pengaruh cukup besar dalam proses implementasi dan pencatatan laporan keuangan berbasis SAK ETAP.

Prospek implementasi SAK ETAP pada koperasi memerlukan pemahaman tentang SAK ETAP. Masih banyak yang menganggap bahwa pembukuan itu tidak penting dalam usaha dan dianggap itu sulit dilakukan . Hal ini yang membuat kurang baiknya persepsi tentang pentingnya pembukuan dalam penerapan SAK ETAP pada entitasnya. Untuk dapat memahaminya bahwa Rudiantoro dan siregar (2012) menyatakan bahwa pengusaha UMKM yang berlatar belakang pendidikan non

akuntansi cenderung lebih lama dalam memahami proses penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Oleh karena itu, bagian akuntansi koperasi yang berlatar belakang pendidikan akuntansi diyakini mempunyai pemahaman yang lebih baik mengenai SAK ETAP dibandingkan bagian akuntansi koperasi yang berlatar belakang pendidikan non akuntansi.

Koperasi juga memiliki peran penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat dengan menjunjung tinggi asas kekeluargaan, kebersamaan, dan untuk menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur sesuai dengan yang tertera dalam pembukaan UUD 1945. Koperasi seringkali masih dianggap sebegini kalangan sebagai badan usaha kelas dua di Indonesia. Padahal potensi dan kekuatan koperasi yang bersumber dari anggota-anggotanya bisa menjadikan koperasi yang kokoh dalam menghadapi peningkatan ekonomi. Jiwa gotong royong yang ada di tubuh koperasi menjadi awal utama penggerak usaha. Koperasi turut berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Berdasarkan data dari *Website* Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia sampai 31 Desember 2015 telah terdapat 212.135 unit koperasi di Indonesia dan dari jumlah tersebut terdapat 150.223 unit Koperasi yang aktif. Terdapat 37.783.160 orang anggota, 37.217 orang manajer dan 537.234 karyawan (www.dekop.go.id).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar yang digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dalam menyusun laporan keuangannya. Entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan entitas yang tidak terdaftar di bursa efek, entitas yang bukan merupakan perusahaan perbankan, entitas yang bukan merupakan perusahaan asuransi, entitas yang bukan merupakan perusahaan dana pensiun dan investasi lainnya. Menurut (Martani,2011) entitas tanpa akuntabilitas publik menerbitkan laporan keuangannya untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal seperti pemilik yang tidak terlihat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga kredit. Contohnya dari entitas tanpa akuntabilitas publik adalah UMKM dan koperasi.

Sejalan dengan pengesahan dan pemberlakuan SAK ETAP, tanggal 8 April 2011 DSAK IAI telah menerbitkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan 8 (PSAK 8) atas Pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 27 (PSAK 27) mengenai akuntansi koperasi. Hal ini sesuai dengan surat edaran Kelembagaan Koperasi dan UKM RI Nomor: 200/Dept.I/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 sehubungan dengan diberlakukannya IFRS di Indonesia, maka entitas bisnis tanpa akuntabilitas publik seperti Koperasi dan UMKM dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu pada aturan SAK ETAP yaitu: (1) Diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan, (2) Pengaturannya lebih sederhana, mengatur transaksi umum yang tidak kompleks, (3)

Perbedaan dengan PSAK No.27/1998 tidak ada kewajiban koperasi menyusun dan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA), (4) Laporan keuangan dengan ETAP yaitu Neraca, Perhitungan SHU, Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sesuai dengan KMKUKM No.4 Tahun 2012 tentang pengkoperasian, SAK ETAP merupakan acuan yang harus dipatuhi oleh koperasi dan aparat dalam melakukan pembinaan dalam menyusun laporan keuangan. SAK ETAP mulai diberlakukan secara efektif per 1 Januari 2011, namun implementasi atau penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan.

Hal ini serupa dengan Koperasi di kabupaten Jember khususnya di daerah Jember selatan telah mengalami perkembangan termasuk koperasi di wilayah Kecamatan Ambulu. Mayoritas koperasi di Kecamatan Ambulu sudah memiliki Unit Simpan Pinjam. Namun, sebagian besar koperasi belum menerapkan SAK ETAP. Sedangkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi harus menerapkan keuangan berbasis SAK ETAP. Kinerja Koperasi yang dilakukan tersebut untuk membantu kebutuhan usaha Masyarakat dan UMKM. Sehingga segala usaha masyarakat di kawasan Ambulu dapat berjalan dengan baik. Seluruh Koperasi yang ada di Kecamatan Ambulu memberikan pelayanan dan proses peminjaman yang lebih mudah, sehingga masyarakat pada umumnya lebih sering menggunakan jasa Koperasi dibandingkan dengan jasa Bank jika peminjamannya lebih kecil. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember menyatakan bahwa data atau nama koperasi yang aktif di Ambulu berjumlah 31 koperasi, dan ada juga beberapa koperasi yang tidak aktif berjumlah 50 Koperasi. Sedangkan data dari wawancara langsung koperasi di Kecamatan Ambulu ada beberapa faktor ketidakaktifan koperasi yaitu mayoritas tidak memiliki modal besar untuk menjalankan sistem koperasi, yang kedua tidak koperaktifnya nasabah dalam membayar angsuran.

Berdasarkan data dinas koperasi Kabupaten Jember menyatakan bahwa masih banyak koperasi yang belum bisa menerapkan laporan keuangan dalam aturan SAK ETAP. Adapun dampak tidak diterapkannya aturan SAK ETAP adalah peminjaman dana dipihak eksternal seperti bank atau perusahaan finansial lainnya tidak bisa 100% penuh, Akan tetapi jika koperasi tersebut bisa menerapkan SAK ETAP maka akan mendapat keuntungan kemudahan persiapan laporan keuangan, mendapat pinjaman dan lebih besar, dapat digunakan dalam beberapa tahun kedepan. koperasi di Kecamatan Ambulu tidak menerapkan SAK ETAP karena minimnya sosialisasi SAK ETAP, anggapan bahwa SAK ETAP tidak efektif, butuh dana untuk mendapatkan karyawan yang terlatih. Maka dari itu banyak pihak dari koperasi memilih untuk menjalankan program masing-masing dalam penyusunan laporan keuangan dengan mudah.

Proses kinerja koperasi memiliki beberapa kekurangan dalam hal akuntansi, sehingga tidak sesuai dengan peraturan SAK ETAP. Dengan adanya pedoman yang

ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada Tahun 2009. Laporan keuangan secara benar yaitu dapat diakui dan diterima ataupun layak dipercaya baik oleh koperasi itu sendiri atau masyarakat umum. Maka dari itu suatu susunan pelaporan keuangan harus mempunyai pedoman agar mudah dipahami. Untuk mengetahui kekurangan dan meningkatkan kinerja Koperasi di Kecamatan Ambulu, maka peneliti melakukan penelitian mengenai Koperasi di Kecamatan Ambulu dengan judul:

“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Pada Koperasi Di Kecamatan Ambulu”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap persepsi implementasi SAK ETAP pada koperasi di Kecamatan Ambulu?
2. Apakah jenjang pendidikan berpengaruh terhadap persepsi implementasi SAK ETAP pada koperasi di Kecamatan Ambulu?
3. Apakah lama masa tugas pekerjaan berpengaruh terhadap persepsi implementasi SAK ETAP pada koperasi di Kecamatan Ambulu ?
4. Apakah pelatihan penyusunan laporan keuangan berpengaruh terhadap persepsi implementasi SAK ETAP pada koperasi di Kecamatan Ambulu?
5. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh terhadap persepsi implementasi SAK ETAP pada koperasi di Kecamatan Ambulu ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada diharapkan penelitian ini dapat mencapai tujuan untuk mengetahui :

1. Menguji secara empiris pengaruh jenjang pendidikan terhadap persepsi implementasi SAK ETAP pada koperasi di Kecamatan Ambulu.
2. Menguji secara empiris pengaruh latar belakang pendidikan terhadap persepsi implementasi SAK ETAP pada koperasi di Kecamatan Ambulu.
3. Menguji secara empiris pengaruh masa tugas pekerjaan terhadap persepsi implementasi SAK ETAP pada koperasi di Kecamatan Ambulu.
4. Menguji secara empiris pengaruh pelatihan penyusunan laporan keuangan terhadap persepsi implementasi SAK ETAP pada koperasi di Kecamatan Ambulu.
5. Menguji secara empiris pengaruh persepsi kegunaan terhadap persepsi implementasi SAK ETAP pada koperasi di Kecamatan Ambulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta sebagai perbandingan atau referensi bagi penelitian pada topik yang sama di masa yang akan datang.

2. Bagi Koperasi

Memberikan masukan kepada pegawai koperasi yang khususnya menempati posisi sebagai pengelola keuangan dapat lebih memahami mengenai implementasi SAK ETAP pada pelaporan keuangannya, karena SAK ETAP dapat berguna diantaranya sebagai bahan pertanggung jawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan koperasi, sebagai sarana perencanaan di masa yang akan datang dan sarana pengambilan keputusan. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas koperasi dalam bentuk penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku.

3. Bagi peneliti

Bagi peneliti hasil penelitiannya adalah sebagai sarana pembelajaran terhadap penelitian di bidang ilmiah serta menambah pengetahuan di dalam bidang akuntansi khususnya pelaporan keuangan berdasarkan SAK ETAP pada koperasi.